



**RINGKASAN
(EXECUTIVE SUMMARY)
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2009
MEDAN, KAMIS 15 APRIL 2010**

PUJI SYUKUR DISAMPAIKAN KEHADIRAT ALLAH S.W.T TUHAN YANG MAHA ESA BERKAT RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN GUBERNUR SUMATERA UTARA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2009 INI DAPAT DILAKSANAKAN DAN DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU BAHKAN LEBIH CEPAT DARI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR SUMATERA UTARA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2008.

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN INI DISUSUN DAN
DISAMPAIKAN UNTUK MEMENUHI AMANAT UNDANG
- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH, YANG MANA PEMERINTAH
MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA PEMERINTAH
DAERAH UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI
URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT AZAS OTONOMI
DAN TUGAS PEMBANTUAN DENGAN TUJUAN UNTUK
MEMBERDAYAKAN DAERAH DAN MENUMBUHKAN
INOVASI KEPALA DAERAH DAN DPRD,
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DAN MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG
EFISIEN DAN EFEKTIF.

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) INI MERUPAKAN
PROGRES REPORT PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH DI SUMATERA UTARA
SELAMA TAHUN ANGGARAN 2009 YANG
DISAMPAIKAN KEPADA DEWAN YANG TERHORMAT
DENGAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN SEBAGAI
BERIKUT :

BAB. I. PENDAHULUAN.

BAB. II. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB. III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.

BAB. IV. PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB. V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.

BAB. VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM
PEMERINTAHAN.

BAB. VII. PENUTUP.

BAB I PENDAHULUAN

KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN INI MERUPAKAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KEPADA MASYARAKAT.

MAKA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERSEBUT, GUBERNUR PADA SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN HARUS MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN

ANGGARAN YANG UNTUK TAHUN INI MERUPAKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN SELAMA TAHUN ANGGARAN 2009, DENGAN TELAH DISAMPAIKANNYA LAPORAN INI KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, DIHARAPKAN DAPAT MENJADI REFERENSI UNTUK MEMBUAT SUATU REKOMENDASI GUNA PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DIMASA YANG AKAN DATANG.

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH MELIPUTI PENJELASAN TENTANG VISI, MISI, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH SERTA PRIORITAS DAERAH.

VISI DAN MISI PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAIMANA YANG TELAH DIRUMUSKAN DALAM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH BAGI PROVINSI SUMATERA UTARA KHUSUSNYA PADA TAHUN 2009-2013, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

VISI:

"SUMATERA UTARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA
DALAM HARMONI KEBERAGAMAN"

MISI:

- 1) MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN, BERSATU, RUKUN DAN DAMAI DALAM KESETARAAN.
- 2) MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.
- 3) MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERBUDAYA, RELIGIUS DALAM KEBERAGAMAN.

4) MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA YANG PARTISIPATIF DAN PEDULI TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN.

UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI TERSEBUT, DIRUMUSKAN STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH DAN PRIORITAS DAERAH.

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERDIRI DARI :

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN

PENGELOLAAN PENDAPATAN DILAKSANAKAN DALAM RANGKA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG DIRUMUSKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH (APBD) DENGAN JUMLAH Rp. 3.896.535.918.353 (TIGA TRILIUN DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN BELAS RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH TIGA RUPIAH).

BERDASARKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DIMAKSUD MAKA DITARGETKAN PENERIMAAN YANG DITETAPKAN PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2009 SEBESAR Rp. 2.108.262.616.180,- YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, BAGIAN LABA BUMD DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH.

NAMUN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2009 REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBESAR Rp.

2.033.121.958.175,76 (DUA TRILIUN TIGA PULUH TIGA MILIAR SERATUS DUA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU SERATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH TUJUH PULUH ENAM SEN) ATAU SEBESAR 96,44 %.

B. PENGELOLAAN BELANJA

PADA TAHUN ANGGARAN 2009 DIALOKASIKAN BELANJA DAERAH SEBESAR RP. 3.896.535.918.353,00,- (TIGA TRILIUN DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN BELAS RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH TIGA RUPIAH) YANG TERDIRI DARI BELANJA LANGSUNG SEBESAR RP. 1.598.694.744.396,00 (SATU TRILIUN LIMA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH EMPAT

RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RUPIAH) ATAU SEBESAR 41,02 %.

SEDANGKAN UNTUK KEPERLUAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBESAR RP. 2.297.841.173.957,00 (DUA TRILIUN DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA SERATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH) ATAU 59,98 %.

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

MENGACU PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA MAKA URUSAN PEMERINTAHAN YANG TELAH DIDESENTRALISASIKAN MELIPUTI 26

URUSAN WAJIB DAN 8 URUSAN PILIHAN DAN UNTUK IMPLEMENTASINYA TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008.

PENANGANAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN SECARA RINCI DIURAIKAN DI DALAM BUKU LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN ANGGARAN 2009 DAN UNTUK SUMMARY INI KAMI URAIKAN BEBERAPA URUSAN WAJIB YANG MELIPUTI :

1. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

DALAM PENANGANAN URUSAN PENDIDIKAN KITA TELAH BERKOMITMEN UNTUK MEMPRIORITASKANNYA DEMIKIAN JUGA HALNYA DENGAN DEWAN YANG TERHORMAT MELALUI REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN ANGGARAN 2008, DAN UNTUK TAHUN

ANGGARAN 2009 EKSEKUTIF BERUPAYA UNTUK MENGAPRESIASI REKOMENDASI DIMAKSUD AGAR LEBIH SERIUS MENANGANI URUSAN PENDIDIKAN, YANG KITA IMPLEMENTASIKAN DENGAN MEMBERI BANTUAN LINTAS SATUAN PENDIDIKAN SISWA SD, SMP, SMA/MA/SMK YANG BERJUMLAH 83.056 SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN.

CAPAIAN KINERJA URUSAN PENDIDIKAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA MENGALAMI PENINGKATAN DARI TAHUN 2008, DITINJAU DARI ANGKA PARTISIPASI KASAR TAMAN KANAK-KANAK DARI 18,82 % MENINGKAT MENJADI 38,04 %, ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN DASAR DARI 97,68 % MENINGKAT MENJADI 98,79 %, ANGKA PARTISIPASI KASAR SEKOLAH MENENGAH DARI 70,25 % MENINGKAT MENJADI 73,67 %, DATA INI MENDESKRIPSIKAN KEPADA KITA

BAHWA SEMAKIN BANYAKNYA ANAK – ANAK YANG BERSEKOLAH.

DALAM KAITAN ITU KITA JUGA MENGUPAYAKAN PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU MENJADI S1 DENGAN JUMLAH 7.447 ORANG GURU DAN SAMPAI SAAT INI PROSES PENYIAPAN KUALIFIKASI GURU YANG TELAH BERSERTIFIKAT BERJUMLAH 31.935 ORANG DARI 204.122 ORANG JUMLAH GURU DI SUMATERA UTARA.

KECENDERUNGAN PENURUNAN JUGA TERLIHAT DALAM PERSENTASE BUTA AKSARA PENDUDUK USIA LEBIH DARI LIMA BELAS TAHUN, MENURUN 3,2 % PADA TAHUN 2005 MENJADI 3,1 % PADA TAHUN 2006 DAN TURUN MENJADI 2,96 % PADA TAHUN 2007 DAN PADA TAHUN 2009 HINGGA MENCAPAI 2,05 %.

2. URUSAN WAJIB KESEHATAN

PERHATIAN UTAMA YANG MENJADI PRIORITAS JUGA DILAKSANAKAN DALAM PENANGANAN URUSAN KESEHATAN. DISAMPING SEBAGAI PERWUJUDAN VISI DAN MISI PENINGKATAN PENANGANAN URUSAN KESEHATAN JUGA MERUPAKAN APRESIASI ATAS REKOMENDASI DEWAN SETAHUN YANG LALU DALAM LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN ANGGARAN 2008.

BEBERAPA INDIKATOR MENYANGKUT PELAKSANAAN URUSAN KESEHATAN YANG MEMILIKI TREN PENINGKATAN DARI WAKTU KE WAKTU, INI DIPERSEPSIKAN SEBAGAI PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA ANTARA LAIN :

- 1) ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PADA TAHUN 2008 SEBESAR 28,2/1000 KELAHIRAN HIDUP MENURUN MENJADI 26,2/1000 KELAHIRAN HIDUP.
- 2) ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) MENUNJUKKAN PERBAIKAN DILIHAT DARI TINGGI RENDAHNYA AKI MEREFLERKSIKAN STATUS KESEHATAN / GIZI IBU SELAMA HAMIL DAN NIFAS, KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN SERTA KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL DAN EKONOMI. UNTUK TAHUN 2008 ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) 290/100.000 KELAHIRAN HIDUP MENURUN MENJADI 260/100.000 KELAHIRAN HIDUP PADA TAHUN 2009, DAN KEDEPAN PROVINSI SUMATERA UTARA TERUS BERUPAYA MENCAPAI TARGET MAKSIMAL SEBESAR 226/100.000 KELAHIRAN HIDUP.
- 3) DISAMPING DUA INDIKATOR DI ATAS, KEMAJUAN JUGA KITA LIHAT DARI UMUR

HARAPAN HIDUP (UHH) PENDUDUK DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008 MENCAPAI 68,89 TAHUN MENINGKAT MENJADI 70,6 TAHUN PADA TAHUN 2009.

4) HAL INI JUGA HARUS DIKUTI DENGAN PREVALENSI GIZI KURANG DAN GIZI BURUK PROVINSI SUMATERA UTARA YANG MASIH PERLU MEMPRIORITASKAN PENANGANAN TERHADAP PENANGGULANGAN GIZI BURUK DAN GIZI KURANG KARENA MASIH DITEMUKANNYA KASUS PREVALENSI BALITA GIZI BURUK DI SUMATERA UTARA.

3. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM MELIPUTI PENANGANAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN SUMBER DAYA AIR.

PENANGANAN INFRASTRUKTUR DI TAHUN 2008 JUGA MERUPAKAN PERHATIAN DEWAN DALAM REKOMENDASI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHUN ANGGARAN 2008. SEJALAN DENGAN ITU PADA PROGRAM TAHUN 2009 EKSEKUTIF BERUPAYA MENGAPRESIASI REKOMENDASI DIMAKSUD.

OLEH KARENA ITU PROVINSI SUMATERA UTARA SELALU MENINGKATKAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN SEPANJANG 139,74 KM, PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SEPANJANG 17,50 (TUJUH BELAS KOMA LIMA PULUH) KM, PEMELIHARAAN RUTIN JALAN SEPANJANG 2.026,57 KM, PENGGANTIAN DAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SEPANJANG 613,50 METER.

PADA KESEMPATAN INI KAMI LAPORKAN KEPADA DEWAN YANG TERHORMAT BAHWA KONDISI JALAN PROVINSI DALAM KRITERIA BAIK PADA TAHUN 2008 SEBESAR 30 % MENINGKAT MENJADI 35 % TAHUN 2009. KRITERIA SEDANG SEBESAR 42,98 % TAHUN 2008 MENURUN MENJADI 38,71 % TAHUN 2009 SEDANGKAN KRITERIA RUSAK SEBESAR 27,02 % TAHUN 2008 MENURUN MENJADI 26,29 % TAHUN 2009.

DALAM PENANGANAN DAN PENGELOLAAN DAERAH IRIGASI DAN RAWA PADA TAHUN 2009 SELUAS 140.683 HEKTAR DENGAN JARINGAN IRIGASI SELUAS 76.344 HEKTAR DAN JARINGAN RAWA SELUAS 64.339 HEKTAR DARI LUAS IRIGASI DAN RAWA YANG ADA DI PROVINSI SUMATERA UTARA SELUAS 1.378.809 HEKTAR YANG MELIPUTI LAHAN IRIGASI

SELUAS 348.509 HEKTAR DAN LAHAN RAWA SELUAS 1.030.300 HEKTAR.

4. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

PEMBANGUNAN ADALAH UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH SEMUA STAKEHOLDERS UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MELALUI PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG ADA, DENGAN HARAPAN KITA AKAN MAMPU MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA. DALAM PROSES ITU INVESTASI MERUPAKAN SALAH SATU VARIABEL YANG SANGAT PENTING DAN SIGNIFIKAN DALAM MENGGERAKKAN RODA PEREKONOMIAN TERUTAMA SEBAGAI KOMPONEN PEMBENTUK PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).

DALAM TAHUN 2009 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DIRENCANAKAN

SEBESAR Rp. 2.703.557.050.000 (DUA TRILIUN TUJUH RATUS TIGA MILYAR LIMA RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA LIMA PULUH RIBU RUPIAH) DENGAN TARGET JUMLAH INVESTOR DUA BELAS PERUSAHAAN, DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) SEBESAR US\$ 187,457,480,000,- (SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH MILIAR EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RIBU DOLAR AMERIKA SERIKAT), DENGAN TARGET JUMLAH INVESTOR TIGA PULUH ENAM PERUSAHAAN. PADA PELAKSANAANNYA INVESTASI DARI DALAM NEGERI DAPAT DIREALISASIKAN SEBESAR Rp. 2.644.965.260.000 (DUA TRILIUN ENAM RATUS EMPAT PULUH EMPAT MILYAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA DUA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH) DENGAN JUMLAH INVESTOR 15 PERUSAHAAN SEDANGKAN UNTUK PMA SEBESAR US\$ 120,404,900,- (SERATUS DUA PULUH JUTA EMPAT RATUS EMPAT RIBU

SEMBILAN RATUS DOLAR AMERIKA SERIKAT)
DENGAN JUMLAH INVESTOR 10 PERUSAHAAN.

5. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

PENGEMBANGAN JUMLAH KOPERASI
SERTA USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM
RANGKA PERCEPATAN PERWUJUDAN EKONOMI
KERAKYATAN MENGALAMI PENINGKATAN
SEBESAR 12,25 % ATAU BERTAMBAH 1.149 UNIT,
DARI SEBELUMNYA YANG BERJUMLAH 9.379 UNIT
PADA TAHUN 2008.

KONDISI INI MENINGKATKAN PENYERAPAN
TENAGA KERJA DIBIDANG KOPERASI PADA
TAHUN 2008 SEBANYAK 10.716 ORANG MENJADI
11.611 ORANG TAHUN 2009.

PENINGKATAN LAIN JUGA TERJADI PADA
VOLUME USAHA KOPERASI YANG MENCAPAI

Rp. 1.129.244.681.000 (SATU TRILIUN SERATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR DUA RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH) DARI ANGKA SEBELUMNYA Rp. 2.913.674.000.000,- (DUA TRILIUN SEMBILAN RATUS TIGA BELAS MILIAR ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA RUPIAH) TAHUN 2008 MENJADI Rp. 4.042.918.681.000,- ATAU MENINGKAT 27,9 %.

6. URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN

TAHUN 2009 PENDUDUK USIA KERJA YANG BERUSIA 15-64 TAHUN BERJUMLAH 9.108.738 (SEMBILAN JUTA SERATUS DELAPAN RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH DELAPAN) ORANG, DIANTARANYA 67,14 % ATAU SEKITAR 6.298.070 ORANG MERUPAKAN ANGKATAN KERJA, SEDANGKAN JUMLAH PENDUDUK YANG MERUPAKAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR

DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BERJUMLAH 185.674 ORANG, DIANTARANYA 25,91 % ATAU SEJUMLAH 48.107 ORANG TELAH DIDISTRIBUSIKAN KE LAPANGAN KERJA YANG MEMBUTUHKAN.

7. URUSAN KETAHANAN PANGAN

URUSAN KETAHANAN PANGAN MERUPAKAN SALAH SATU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG SANGAT STRATEGIS DALAM MEWUJUDKAN “MASYARAKAT TIDAK LAPAR”. MEMENUHI KEBUTUHAN KONSUMSI PANGAN YANG TERUS BERKEMBANG SEIRING DENGAN PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK, SEHINGGA MEMERLUKAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG CUKUP DAN BERKELANJUTAN.

KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN URUSAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008 TERUS

MENGALAMI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS YANG DITUNJUKKAN AGAR SWASEMBADA PANGAN DENGAN KETERSEDIAAN PANGAN MENCAPAI 130,10 %.

KOMODITI PADI TERUS MENGALAMI PENINGKATAN DARI 3.340,794 TON PADA TAHUN 2008 MENJADI 3.489,984 TON ATAU NAIK 4,44 %.

KOMODITI JAGUNG 1.169,023 TON PADA TAHUN 2008 MENINGKAT MENJADI 1.908,969 TON PADA TAHUN 2009 ATAU MENINGKAT 6,37 %.

DEMIKIAN HALNYA DENGAN KOMODITI KEDELAI DARI 11.647 TON TAHUN 2008 MENINGKAT MENJADI 16.858 TON TAHUN 2009, ANGKA INI MENUNJUKKAN KENAIKAN SEBESAR 36,16 %.

DEMIKIAN DESKRIPSI PENANGANAN BEBERAPA URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009, SEDANGKAN URAIAN SECARA LENGKAP MENYANGKUT 26 URUSAN DIURAIKAN DI DALAM BUKU LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN GUBERNUR SUMATERA UTARA.

URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

POTENSI PERIKANAN DAN KELAUTAN DI SUMATERA UTARA MERUPAKAN POTENSI UNGGULAN KHUSUSNYA DI KAWASAN AGROMARINEPOLITAN WILAYAH PESISIR, PULAU-PULAU KECIL DAN PULAU – PULAU TERLUAR DI SUMATERA UTARA SEPERTI LUAS LAUT SUMATERA UTARA YANG MENCAPAI 110.000 KM² DENGAN

PANJANG PANTAI 1.300 KM. POTENSI INI TELAH TERMANFAATKAN SEKITAR 90,75 % KHUSUSNYA DI KAWASAN PANTAI TIMUR DENGAN JUMLAH TANGKAPAN IKAN MENCAPAI 276.030 TON PER TAHUN.

SEDANGKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DI KAWASAN PANTAI BARAT MASIH PERLU DITINGKATKAN KARENA TINGKAT PEMANFAATAN BARU MENCAPAI 8,79 %.

2. URUSAN PILIHAN PERTANIAN

DISAMPING POTENSI PERIKANAN DAN KELAUTAN SEBAGAIMANA DIJELASKAN DI ATAS, POTENSI PERTANIAN JUGA MERUPAKAN KOMODITI UNGGULAN KHUSUSNYA DI KAWASAN AGROPOLITAN DATARAN TINGGI BUKIT BARISAN. POTENSI DIMAKSUD MENGHASILKAN KOMODITI DARI SEKTOR PERTANIAN BERUPA TANAMAN

PANGAN DAN PALAWIJA, HORTIKULTURA BERUPA SAYUR DAN BUAH – BUAHAN.

PEMBANGUNAN PERTANIAN DITUJUKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI. INDIKATOR YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENGEMBANGKAN KESEJAHTERAAN PETANI, ANTARA LAIN : PENDAPATAN, TINGKAT UPAH DAN DAYA BELI YANG DI UKUR DENGAN NILAI TUKAR PETANI (NTP), SERTA TERBUKANYA AKSES BAGI SETIAP PELAKU USAHA PERTANIAN TERHADAP SUMBER DAYA PRODUKTIF PERTANIAN BERUPA : MODAL, INFORMASI, TEKNOLOGI, LAHAN DAN AIR.

PEMBANGUNAN PERTANIAN TELAH MEMBERIKAN SUMBANGAN BESAR DALAM PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA, BAIK BERUPA SUMBERDAYA LANGSUNG SEPerti

DALAM PEMBENTUKAN PDRB, PENYERAPAN TENAGA KERJA, PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN PENEKANAN INFLASI MAUPUN SUMBERDAYA TIDAK LANGSUNG SEPERTI PENCIPTAAN KONDISI YANG KONDUSIF BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN HUBUNGAN SINERGIS DENGAN SEKTOR LAIN, KEBERHASILAN TERSEBUT TIDAK TERLEPAS DARI PENANGANAN URUSAN PERTANIAN YANG MERUMUSKAN DALAM BEBERAPA PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK MENGHANTARKAN SUMATERA UTARA SEBAGAI SWASEMBADA PANGAN, SEHINGGA PRODUKSI PADI DI SUMATERA UTARA NAIK DARI 3.340,794 TON TAHUN 2008 MENJADI 3.489,984 TON PADA TAHUN 2009 ATAU 4,44%, JAGUNG DARI 1.169,023 TON PADA TAHUN 2008 NAIK MENJADI 1.908,969 TON ATAU 6,37% PADA TAHUN 2009, KEDELAI NAIK DARI 11.647 TON TAHUN 2008 MENJADI 16.858 TON ATAU 36,16% PADA TAHUN 2009, UBI

KAYU NAIK 736.771 TON PADA TAHUN 2008 MENJADI 973.316 TON ATAU 32,11% PADA TAHUN 2009, UBI JALAR NAIK 114.187 TON TAHUN 2008 MENJADI 140.438 TON ATAU 22,99% PADA TAHUN 2009, SEHINGGA PADA TAHUN 2009 SUMATERA UTARA SWASEMBADA BERAS SEBESAR 222.533 TON ATAU 112,47% HAL INI MENJADIKAN SUMATERA UTARA PENGHASIL BERAS KE 5 (LIMA) DI INDONESIA SERTA PENGHASIL JAGUNG TERBESAR KE 5 (LIMA) DI INDONESIA.

3. URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

DILIHAT DARI STRUKTUR, PEREKONOMIAN SUMATERA UTARA PADA TAHUN 2009 DIDOMINASI OLEH SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN SEBESAR 23,29 %, DIKUTI OLEH SEKTOR PERTANIAN 23,03 %, SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN 19,01 %, SEKTOR JASA-JASA 10,45 %, SEKTOR

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 8,90 %, SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN 6,65 %, SEKTOR BANGUNAN 6,30 %, SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 1,37 %, DAN SEKTOR LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH 0,98 %.

BERDASARKAN DATA DI ATAS, KONTRIBUSI SEKTOR PERINDUSTRIAN MERUPAKAN PENYUMBANG TERBESAR DALAM MEMBENTUK PDRB PROVINSI SUMATERA UTARA, HAL INI TERUTAMA DARI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN CPO DAN KARET ALAM.

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

PEMBERIAN TUGAS PEMBANTUAN PADA PRINSIPNYA MERUPAKAN TUGAS UNTUK MEMBANTU MENJALANKAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM

MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, UNTUK INI BEBERAPA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENERIMA TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2009.

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN MENERIMA TUGAS PEMBANTUAN DARI DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN SEBESAR Rp. 1.040.180.000,- (SATU MILYAR EMPAT PULUH JUTA SERATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN.

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MENERIMA TUGAS PEMBANTUAN DARI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR SEBESAR Rp. 22.334.309.000,- (DUA PULUH DUA MILYAR TIGA

RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH) UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA DAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA.

DINAS PERKEBUNAN MEMPEROLEH TUGAS PEMBANTUAN DARI DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN UNTUK PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS, PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DENGAN PENGALOKASIAN DANA SEBESAR Rp. 2.462.039.000,- (DUA MILYAR EMPAT RATUS ENAM PULUH DUA JUTA TIGA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH).

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENERIMA TUGAS PEMBANTUAN DARI DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH – PEMBINAAN PENYIAPAN PEMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI (P4T) DAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH PEMBINAAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI (P2MKT) DENGAN JUMLAH ANGGARAN SEBESAR Rp. 3.075.055.000,- (TIGA MILYAR TUJUH PULUH LIMA JUTA LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH).

DINAS PERTANIAN MENERIMA TUGAS PEMBANTUAN DARI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR Rp. 5.134.950.000,- (LIMA MILYAR SERATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

DINAS KEHUTANAN MEMPEROLEH TUGAS PEMBANTUAN DARI SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHUTANAN UNTUK PROGRAM KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN JUMLAH ANGGARAN Rp. 672.440.000,- (ENAM RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH).

DINAS SOSIAL MEMPEROLEH TUGAS PEMBANTUAN DARI DEPARTEMEN SOSIAL UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR Rp. 1.757.710.000,-

(SATU MILYAR TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA
TUJUH RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH).

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. KERJASAMA

DALAM MEWUJUDKAN LAJU PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA, PADA TAHUN 2009 TELAH DILAKSANAKAN KERJASAMA LUAR NEGERI DENGAN PROVINSI BEKES COUNTY REPUBLIK HONGARIA DALAM PEMBANGUNAN KEDUA PROVINSI KHUSUSNYA PADA BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI, OLAHRAGA DAN PENDIDIKAN, INFORMASI, ADMINISTRASI PUBLIK, ORGANISASI SIPIL, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

2. PELAKSANAAN KOORDINASI

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MELAKSANAKAN RAPAT KERJA / KOORDINASI ANTARA GUBERNUR DENGAN BUPATI / WALIKOTA, MUSPIDA PLUS PROVINSI, KABUPATEN / KOTA SE SUMATERA UTARA. PELAKSANAAN KEGIATAN INI DIUPAYAKAN UNTUK MENJALIN KOORDINASI, SINKRONISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN, PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MENUMBUHKAN DAYA SAING EKONOMI SERTA MENANGANI PENYELENGGARAAN PROGRAM NASIONAL SEPERTI PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN / KOTA DAN PROVINSI SERTA MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN KAMTIBMAS, TERITORIAL DAN PENEGAKAN HUKUM DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

3. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

UNTUK PENANGANAN BATAS WILAYAH, PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TELAH MEMBENTUK TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH (TPPBD) DENGAN MELAKSANAKAN KONSULTASI KE DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENYELESAIKAN PERMASALAHAN BATAS WILAYAH DENGAN PROVINSI RIAU, SUMATERA BARAT DAN NANGROE ACEH DARUSSALAM.

DEMIKIAN HALNYA PERMASALAHAN BATAS WILAYAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN, KABUPATEN MANDAILING NATAL, KABUPATEN TAPANULI TENGAH DAN KABUPATEN PADANG LAWAS, BEGITU JUGA DENGAN BATAS WILAYAH DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH DENGAN

KOTA SIBOLGA, KABUPATEN ASAHAN DENGAN
KOTA TANJUNG BALAI, KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN SAMOSIR.

SEDANGKAN BATAS WILAYAH KABUPATEN
DELI SERDANG DENGAN KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI MAUPUN DENGAN KOTA MEDAN
TELAH DIFASILITASI UNTUK PENYELESAIANNYA,
NAMUN UNTUK PENYELESAIAN BATAS INI MASIH
PERLU TINDAK LANJUT DIMASA YANG AKAN
DATANG.

BAB VII PENUTUP

DEMIKIAN RINGKASAN (EXECUTIVE
SUMMARY) INI DISAMPAIKAN UNTUK MEMUDAHKAN
DEWAN YANG TERHORMAT MEMBAHAS BUKU
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
TAHUN ANGGARAN 2009 SEHINGGA DAPAT

DIRUMUSKAN REKOMENDASI GUNA PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI MASA YANG AKAN DATANG.

SEMOGA ALLAH S.W.T, TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MERIDHOI HARAPAN DAN CITA – CITA KITA UNTUK MEMAJUKAN DAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT, KIRANYA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2009 INI BERMANFAAT BAGI SEMUA PIHAK DAN MENJADI BAHAN EVALUASI SEJAUH MANA KITA MAMPU MEWUJUDKAN HARAPAN DAN CITA – CITA YANG DIAMANAHKAN OLEH RAKYAT.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WABILLAHIT TAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMUALAIKUM WR. WB.

GUBERNUR SUMATERA
UTARA

H. SYAMSUL ARIFIN, SE